

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Neng Kamarni

***Abstrak :** This study aims to analyze the factors of poverty in Padang Pariaman district which is one of regencies in West Sumatra that have a lot of poor people. According to BPS, the number of poor people in West Sumatra in 2008 was 477,200 person. In Kabupaten Padang Pariaman according to results of the Social Protection Program Data Collection Year 2008 (PPLS.08) there are 19,855 HH living below the poverty line. Some of the factors causing poverty are education level, employment status, size of the HH, etc.. Low education of HH head significantly influence the formation of HH poor in the district of Padang Pariaman 1.194 times compared with the tendency of highly educated head of HH. HH heads informal employment status was also significant with the trend of 2.384 times than HH head who work formally. And for the size of HH results were also significant with the trend of 5.212 times, this means that the number of members of HH to be the main variables that support the HH to be poor.*

Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga termasuk daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin yang tidak sedikit. Menurut hasil pengumpulan data oleh BPS, jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat selama kurun waktu tahun 1999-2008 cukup berfluktuasi. Pada awalnya jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada tahun 1999 adalah 566,1 ribu jiwa artinya terdapat penduduk sebanyak 566.100 orang yang tidak mampu melewati batas garis kemiskinan atau hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2003 jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat terjadi penurunan dan tercatat sebanyak 501.100 jiwa. Pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin kembali menurun menjadi 482.800 jiwa. Di tahun 2007 penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 529.300 jiwa. Terakhir di tahun 2008 mengalami penurunan kembali sebesar 1,24% dibandingkan tahun 2007 menjadi 10,67 % dari total rumah tangga yang ada di Sumatera Barat atau tepatnya sebanyak 477.200 jiwa.

Di Kabupaten Padang Pariaman sendiri angka kemiskinan juga tidak sedikit. Hal ini dapat dilihat dari jumlah rumah tangga miskin berdasarkan Pendataan Sosial Ekonomi yang dilaksanakan pada tahun 2005 (PSE.05) terdapat 24.683

rumah tangga miskin atau sekitar 29,42%. Angka ini tentu bukan angka yang kecil dan sangat perlu jadi perhatian pemerintah, baik pemerintah daerah Padang Pariaman sendiri maupun pemerintah pusat. Pendataan ini ditujukan untuk mengetahui jumlah rumah tangga miskin dan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dalam Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2008 (PPLS.08) terjadi sedikit penurunan rumah tangga miskin yaitu sebanyak 19.855 rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah ini turun 6,52% dari tahun 2005 atau turun dari 29,42% menjadi 22,90%. Dalam PSE.05 ditekankan pada empat belas variabel kemiskinan yaitu (1) Luas lantai bangunan tempat tinggal; (2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal; (3) Jenis dinding bangunan tempat tinggal; (4) Ketersediaan fasilitas buang air besar yang biasa digunakan; (5) Sumber penerangan rumah tangga; (6) Sumber air minum yang biasa digunakan; (7) Bahan bakar yang dipergunakan untuk memasak sehari-hari; (8) Frekuensi mengkonsumsi daging, susu, atau ayam dalam seminggu; (9) Frekuensi membeli pakaian baru dalam setahun; (10) Frekuensi makan dalam sehari; (11) Kesanggupan membayar biaya pengobatan puskesmas/poliklinik; (12)

Sumber penghasilan kepala rumah tangga dan rata-rata pendapatan dalam sebulan; (13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga; (14) Kepemilikan aset seperti sepeda motor, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Penyebab kemiskinan di Padang Pariaman tidak jauh berbeda dengan Sumatera Barat. Banyak faktor penyebab di antaranya pendapatan masyarakat yang masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, etos kerja atau budaya kerja, penguasaan lahan produktif, pendidikan, dan juga seperti halnya Sumatera Barat terbatasnya akses informasi. Selain itu masih ada lagi faktor yang menyebabkan kemiskinan. Faktor banyaknya jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan kepala keluarga juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga. Variabel pendapatan ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga dimana pendapatan yang tidak mencukupi akan mengakibatkan kesejahteraan keluarga sulit tercapai. Hal ini ditambah berat karena harga yang terus mengalami kenaikan. Di satu sisi pendapatan yang cenderung statis, di sisi lain inflasi juga naik. Begitu juga dengan kenaikan harga BBM yang juga membuat harga kebutuhan pokok juga naik.

Tinjauan Pustaka

Konsep Kemiskinan

Menurut BPS ukuran kemiskinan dihitung dengan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

Meskipun kemiskinan menurut konsep ekonomi dapat diukur dari kecukupan pendapatan, kemungkinan juga dapat diukur dari ciri-ciri yang melekat pada penduduk miskin tersebut. Ciri tersebut antara lain ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak dapat dirubah, yang tercermin didalamnya kemauan untuk tertinggal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya produktivitas, terbatasnya modal yang dimiliki, rendah-

nya pendapatan, dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimumnya. Tingkat pendapatan minimum akan merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau biasa disebut **garis kemiskinan**.

Seseorang dikatakan *miskin secara sosial* apabila tingkat pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, antara lain pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. Rendahnya tingkat pendapatan ini terutama disebabkan oleh karena keterbatasan sarana dan prasarana fisik serta kelangkaan modal atau miskin karena sebab alami. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup (Todaro; 1987)

Kemiskinan kultural disebabkan pemahaman suatu sikap, kebiasaan hidup dan budaya seseorang atau masyarakat yang merasa kecukupan dan tidak kekurangan. Kelompok ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan dan cenderung tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya meskipun ada usaha pihak luar untuk membantu. Dengan ukuran absolut mereka dapat dikatakan miskin, tetapi mereka tidak merasa miskin dan tidak mau disebut miskin.

Kemiskinan relatif adalah pendapatan seseorang/rumah tangga yang sudah berada di atas garis kemiskinan, namun relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya, maka orang atau rumah tangga tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Menurut John Kenneth Galbraith (1992), walaupun tingkat pendapatan sudah mampu mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya, maka orang atau keluarga tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Kemiskinan relatif erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang bersifat struktural, yakni kebijaksanaan pembangunan belum menjangkau

seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan.

Ukuran Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah jumlah minimum pengeluaran konsumsi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ditunjukkan dalam rupiah/kapita/bulan (BPS, 1992). Garis kemiskinan adalah angka absolut. Apabila tingkat pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan, sehingga jumlahnya tidak dapat memenuhi hidup minimumnya ini yang disebut kemiskinan absolut.

Konsep dasar ukuran kemiskinan berhubungan dengan pengeluaran kebutuhan dasar minimum rata-rata seorang individu hidup normal. Kebutuhan dasar termasuk pilihan makanan dasar dan golongan bukan makanan. Jika seorang individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar menunjukkan bahwa individu tersebut dapat dikategorikan miskin. Jumlah pengeluaran dapat digunakan batas antara miskin dan tidak miskin. Batas ini disebut juga dengan garis kemiskinan.

Menurut konsep pengeluaran yang dikembangkan Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan dinyatakan sebagai besarnya rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi setara dengan 2100 kalori perkapita perhari ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lain seperti sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan dan bahan bakar. Besarnya pengeluaran per kapita yang ditentukan sebagai garis kemiskinan dibedakan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Disamping perkiraan garis kemiskinan nasional, telah dilakukan pula beberapa perkiraan mengenai garis kemiskinan internasional didalam mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia. Garis kemiskinan Sayogyo (1996) untuk daerah pedesaan dan perkotaan masing-masing sama dengan 20 kg dan 30 kg beras dalam nilai rupiah pendapatan perkapita rata-rata individu. Sayogyo mengajukan ukuran garis kemiskinan untuk wilayah Indonesia, memperinci garis kemiskinan yang mempunyai ciri: (a) Spesifikasi atas tiga garis kemiskinan yang mencakup konsepsi nilai ambang kecukupan pangan; (b) menghubungkan tingkat pengeluaran rumah tangga

dengan ukuran kecukupan pangan (kalori dan protein).

Berdasarkan dari beberapa penelitian, Sayogyo mengklasifikasikan suatu wilayah menjadi tiga, yaitu: miskin, miskin sekali, dan yang paling miskin baik untuk daerah pedesaan maupun untuk kota seperti pada tabel.1

Tabel 1.
Batas Kemiskinan Diukur dengan Nilai Tukar Beras Per Tahun

Klasifikasi	Nilai Tukar Beras/Orang/Tahun	
	Perkotaan	Pedesaan
(1)	(2)	(3)
Miskin	480 Kg	320 Kg
Miskin Sekali	360 Kg	240 Kg
Paling Miskin	270 Kg	180 Kg

Sumber : Sayogyo (1996)

Dari pendekatan kemiskinan yang menjadi alat utama ukuran kemiskinan saat ini adalah kemiskinan absolut, yakni kemiskinan yang garis batasnya ditetapkan berdasarkan pada kebutuhan pokok manusia per hari berupa kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan yang dinyatakan dalam satuan mata uang.

Penyebab Kemiskinan

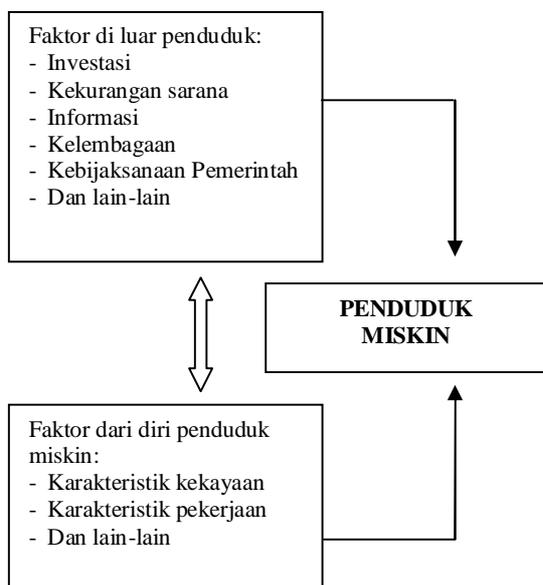
Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor dan saling terkait. Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui faktor penyebab kemiskinan dapat dibedakan atas pendekatan ekonomi, sumber daya manusia dan pendekatan sosial budaya. Pendekatan ekonomi lebih menitikberatkan pada lingkungan penduduk miskin itu sendiri seperti terlihat dari pendapatan yang rendah, gizi buruk, tingkat kematian yang tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah.

Pendekatan sumber daya manusia lebih menekankan pada kualitas dari SDM itu sendiri. Sementara pendekatan sosial budaya lebih banyak melihat dari diri penduduk miskin seperti menganalisis cara hidup dan tingkah laku penduduk miskin.

Dari ketiga pendekatan yang dikemukakan ini, pendekatan ekonomi dan pendekatan sumber daya manusia lebih banyak digunakan dalam menganalisis faktor-faktor penyebab ke-

miskinan. Berdasarkan kedua pendekatan ini faktor kemiskinan dapat dibedakan atas dua faktor secara garis besar. Faktor pertama yaitu faktor yang berasal dari luar penduduk miskin terdiri dari kekurangan investasi, sarana, informasi dan lain-lainnya. Faktor kedua adalah faktor yang bersumber dari penduduk itu sendiri, seperti pendidikan, pekerjaan, kekayaan dan lain-lain. (Gambar 1.)

Gambar 1.
Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan



Sumber : BPS, Beberapa Dimensi Sosial Ekonomi Penduduk Miskin (1999)

Adapun faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kemiskinan tersebut adalah sebagai berikut :

Tingkat Pendidikan

Menurut Todaro (2003) mengemukakan bahwa berbagai penelitian di bidang ilmu ekonomi pendidikan yang dilakukan di negara-negara maju maupun di negara berkembang, pada awalnya menitikberatkan perhatian pada keterkaitan antara pendidikan, produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan output. Hal ini tidak mengherankan karena sasaran utama pembangunan pada tahun 1950-an dan 1960-an adalah memaksimumkan tingkat pertumbuhan output total. Akibatnya, keterkaitan antara pendidikan dengan

distribusi pendapatan dan usaha pengentasan kemiskinan absolut sempat terabaikan.

Mantra (2000) menyebutkan bahwa pendidikan berorientasi pada penyiapan tenaga kerja terdidik, terampil dan terlatih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan dalam kaitannya dengan penyiapan tenaga kerja harus selalu lentur dan berwawasan lingkungan agar pendidikan keterampilan dan keahlian dapat disesuaikan dengan kebutuhan terhadap jenis-jenis keterampilan dan keahlian profesi yang selalu berubah.

Menurut Bellante dan Jackson (1990) tingkat pendidikan mempengaruhi pendapatan. Pendidikan yang lebih tinggi merupakan hasil sesuatu yang kompleks yaitu menyangkut kemampuan serta kepribadian, sementara pemilihan pekerjaan merupakan kompromi antara minat kemampuan, nilai dan kesempatan.

Elfindri (2001) mengemukakan bahwa pendidikan juga akan berkaitan dengan pendapatan individual (prestasi). Dari segi lain peningkatan pendidikan menghasilkan tingkat pendapatan, sekaligus akan membentuk pendapatan (prestasi). Pendidikan yang tinggi akan memberikan pendapatan yang tinggi, juga berarti semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin tinggi tingkat penghasilan para pekerja.

Dalam arti sederhana pendidikan dimaksudkan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Menurut Langeved (dalam Hasbullah; 2003) pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju pada pendewasaan anak itu atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datang dari orang dewasa (atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.

Selanjutnya menurut Rousseau (dalam Hasbullah; 2003) pendidikan adalah memberi perbekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa. Sejalan dengan ini, dalam UU No. 20 Tahun 2003 tercantum pengertian pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif me-

ngembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan diharapkan dapat mengatasi keterbelakangan ekonomi lewat efeknya pada peningkatan kemampuan manusia dan motivasi manusia untuk berprestasi. Pendidikan berfungsi menyiapkan salah satu input dalam proses produksi, yaitu tenaga kerja agar dapat bekerja dengan produktif karena kualitasnya. Hal ini akan mendorong peningkatan output yang diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga/rumah tangga.

Status Pekerjaan

Di Indonesia, munculnya dilema ekonomi informal adalah sebagai dampak makin kuatnya proses modernisasi yang bergerak bias, menuju sifat-sifat yang dualistis. Bias pembangunan secara makro akan menghasilkan sistem ekonomi lain yaitu sektor informal yang sebagian besar terjadi di Negara-negara sedang berkembang. Fenomena dualisme ekonomi yang melahirkan sektor informal ini menunjukkan bukti adanya keterpisahan secara sistemis-empiris antara sektor formal dan informal dari sebuah system ekonomi nasional. Hal ini sekaligus memberikan legitimasi ekonomi dan politik bahwa perekonomian suatu Negara mengalami stagnasi dengan tingkat pengangguran yang sangat tinggi dan ketimpangan sosial-ekonomi yang cukup besar (Mulyadi; 2003).

Menurut Rachbini (dalam Mulyadi; 2003) terdapat dua faktor yang mengakibatkan munculnya dualisme ekonomi antara sektor formal dan informal. Pertama berkaitan dengan faktor eksternal dan kedua faktor internal.

Termasuk dalam faktor eksternal dalam hal *pertama*, bahwa pranata-pranata yang ada mendukung kegiatan ekonomi formal yang modern. Meskipun tampak seperti sebuah kesatuan sistem yang bersifat komplementer dan saling membutuhkan satu sama lain, namun pranata formal dan informal bersifat *disagregatif* satu sama lain. Posisinya yang subordinatif dan resesif inilah mengakibatkan sektor informal memiliki posisi tawar yang sangat lemah, se-

hingga tidak memberikan peluang yang lebih luas dan prospeknya kurang menguntungkan.

Kedua, yang termasuk ke dalam faktor eksternal juga terjadinya kesenjangan upah. Diskriminasi tingkat upah baik oleh lembaga-lembaga informal, birokrasi maupun lingkungan pelaku-pelaku ekonomi formal sendiri ikut mengekalkan keterpisahan dua sektor tersebut.

Ketiga, terkait dengan masalah teknis politis, dimana para pelaku politik (kalangan birokrasi) di Indonesia kurang mencermati dan memahami perkembangan modernisasi yang begitu cepat. Faktor ketiga ini ditandai dengan adanya paradoks pengambilan keputusan di tingkat pusat dan lokal (daerah) serta paradoks peraturan yang mendukung dan merusak berbagai kegiatan sektor informal.

Sedangkan yang berkaitan dengan faktor internal adalah tingkat produktivitas yang sangat tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini ditunjukkan sektor formal daripada sektor Informal. Pada sektor formal ditunjukkan oleh *marginal productivity of labor* (MPL) yang sangat tinggi. Semuanya itu terjadi akibat ketimpangan dalam penguasaan akses terhadap modal, kredit, sumber daya pekerjaan, teknologi dan proses pengolahan informasi. Dalam hal ini penguasaan terhadap aset produksi, sektor formal jauh lebih mampu berkembang secara pesat seiring dengan perkembangan modernisasi yang terjadi. Lain halnya yang terjadi di sektor informal, mereka sama sekali sulit memperoleh akses modal, teknologi, apalagi harus menjangkau teknologi yang perkembangannya lebih cepat daripada pertumbuhan kinerja sektor informal.

Ukuran Keluarga/Rumah tangga

Keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada konsep yang ditentukan dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Jadi keluarga dalam hal ini adalah seseorang atau sekelompok orang dan merupakan satu kesatuan keluarga yang menempati suatu bangunan sensus atau lebih. Jadi sebuah rumah tangga bisa terdiri dari satu orang atau lebih anggota rumah tangga.

BPS (2008) mendefinisikan ukuran rumah tangga menyatakan jumlah seluruh anggota yang menjadi tanggungan dalam rumah tangga tersebut. Ukuran rumah tangga dapat

memberikan indikasi beban rumah tangga. Semakin besar ukuran rumah tangga berarti semakin banyak anggota rumah tangga yang pada akhirnya akan semakin berat beban rumah tangga tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Menurut Sedioetama (1989), kebutuhan sehari-hari dalam suatu rumah tangga tidak merata antar anggota rumah tangga, karena kebutuhan setiap anggota rumah tangga tergantung pada struktur umur mereka. Artinya, setiap anggota rumah tangga memerlukan porsi makanan yang sesuai dengan tingkat kebutuhannya yang ditentukan berdasarkan umur dan keadaan fisik masing-masing.

Dilain pihak pola konsumsi juga dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendapatan rumah tangga. Semakin membaiknya pendapatan rumah tangga, biasanya akan diiringi dengan alokasi pengeluaran untuk keperluan pangan yang cenderung menurun dan sebaliknya pengeluaran untuk keperluan non makanan cenderung akan meningkat.

Dengan adanya batasan seperti di atas, maka pola konsumsi antar rumah tangga akan berbeda satu dengan yang lainnya baik dari segi alokasi pengeluaran untuk makanan maupun non makanan. Perbedaan pola konsumsi antar rumah tangga tersebut dapat disebabkan oleh besar kecilnya ukuran rumah tangga. Hasil pendataan BPS pada tahun 1999 menunjukkan sebagian besar dari rumah tangga miskin mempunyai 4,9 anggota rumah tangga. Jumlah rata-rata anggota rumah tangga ini lebih besar dibanding jumlah rata-rata anggota rumah tangga tidak miskin. Ini menunjukkan bahwa rumah tangga miskin harus menanggung beban yang lebih besar dibanding rumah tangga tidak miskin. Rumah tangga miskin di daerah perkotaan rata-rata mempunyai 5,1 anggota rumah tangga, sedangkan rumah tangga miskin di daerah pedesaan rata-rata mempunyai 4,8 anggota rumah tangga. Dari angka ini dapat diketahui bahwa beban rumah tangga miskin di daerah perkotaan dalam memenuhi kebutuhan hidup ternyata lebih besar dari pada rumah tangga miskin di daerah pedesaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada seluruh rumah tangga yang berdomisili di Kabupaten Padang Pariaman yang tersebar di seluruh kecamatan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan pada tahun 2008 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman.

Pemilihan sampel rumah tangga susenas di Kabupaten Padang Pariaman dilakukan dengan menggunakan *Multistage sampling* (sampel bertingkat atau bertahap) dimana pertama kali dilakukan pengambilan sampel terhadap Blok Sensus di seluruh Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Blok Sensus adalah wilayah kerja pencacahan yang merupakan bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang memiliki muatan sekitar 100 (minimum 80 dan maksimum 120) rumah tangga/bangunan sensus bukan tempat tinggal (BSBTT)/bangunan sensus tempat tinggal kosong (BSTTK) atau kombinasi ketiganya dalam satu hamparan (tidak dipisahkan oleh Blok Sensus lain), dan diperkirakan tidak akan berubah dalam jangka waktu lebih kurang 10 tahun.

Penghitungan interval sampel (I) untuk pemilihan rumah tangga dilakukan dengan cara :

$$I = \frac{\text{Banyaknya rumah tangga hasil pendaftaran rumah tangga}}{16}$$

Jumlah Blok Sensus terpilih di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2008 sebanyak 40 Blok Sensus yang terdiri atas 36 Blok Sensus di Pedesaan dan sebanyak 4 Blok Sensus di Perkotaan.

Dengan komposisi jumlah sampel Blok Sensus seperti pada tabel 3 maka distribusi sampel rumah tangga untuk daerah Pedesaan sebanyak 576 rumah tangga dan di perkotaan sebanyak 64 rumah tangga. Secara total jumlah sampel rumah tangga untuk keseluruhan adalah sebanyak 640 rumah tangga.

Tabel 3
Distribusi Sampel Blok Sensus dan Rumah Tangga Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Padang Pariaman

No	Kecamatan	Blok Sensus Terpilih			Rumah Tangga Terpilih		
		Pedesaan	Perkotaan	Jumlah	Pedesaan	Perkotaan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kec. Batang Anai	3	1	4	48	16	64
2	Kec. Lubuk Alung	3	1	4	48	16	64
3	Kec. Sintuk Toboh Gadang	1	0	1	16	0	16
4	Kec. Ulakan Tapakis	2	0	2	32	0	32
5	Kec. Nan Sabaris	2	1	3	32	16	48
6	Kec. 2x11 Enam Lingkung	2	0	2	32	0	32
7	Kec. Enam Lingkung	2	0	2	32	0	32
8	Kec. 2x11 Kayu Tanam	2	1	3	32	16	48
9	Kec. VII Koto Sungai Sarik	3	0	3	48	0	48
10	Kec. Patamuhan	2	0	2	32	0	32
11	Kec. Padang Sago	1	0	1	16	0	16
12	Kec. V Koto Kp. Dalam	2	0	2	32	0	32
13	Kec. V Koto Timur	2	0	2	32	0	32
14	Kec. Sungai Limau	3	0	3	48	0	48
15	Kec. Batang Gasan	1	0	1	16	0	16
16	Kec. Sungai Geringging	3	0	3	48	0	48
17	Kec. IV Koto Aur Malintang	2	0	2	32	0	32
	Kab. Padang Pariaman	36	4	40	576	64	640

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman

Metode Analisis Data

Penelitian dilakukan dengan metode analisa deskriptif, yang diharapkan dari penyajiannya akan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang gejala-gejala sosial tertentu atau aspek kehidupan tertentu pada masyarakat yang diteliti.

Analisis ini menggunakan analisis *Logistic Regresison Model* untuk menunjukkan probabilitas suatu rumah tangga miskin. Probabilitas ini didasarkan pada asumsi mengenai variabel random yang diteliti berbentuk *logistic distribution function model*. Model ini akan digunakan dalam penelitian analisis kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Padang Pariaman. Menurut Gujarati

(2000) Logistik Model berasal dari *Logistic Distribution Function* dengan persamaan :

$$P_i = EY = 1/X_1 = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_p X_p)}}$$

Persamaan (1) di atas kemudian di sederhanakan menjadi :

$$P_i = \frac{1}{1 + e^{-Z_i}}$$

Agar persamaan (2) dapat diestimasi, maka persamaan tersebut dimanipulasi dengan

cara mengalikan $1+e^{-Z_i}$ pada kedua sisinya, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$(1+e^{-Z_i})P_i = \frac{1}{1+e^{-Z_i}} \times (1+e^{-Z_i})$$

$$\text{atau } (1+e^{-Z_i})P_i = 1$$

$$\frac{(1+e^{-Z_i})P_i}{(1+e^{-Z_i})P_i} = \frac{1}{(1+e^{-Z_i})P_i}$$

$$\frac{P_i - 1}{P_i} = \frac{1}{P_i - 1}$$

Sehingga,

$$e^{Z_i} = \frac{1}{1 - P_i}$$

Karena *range* P_i berkisar antara 0 - 1 dan P_i berhubungan secara non linear dengan Z_i . Jika P_i merupakan notasi untuk rumah tangga yang berstatus miskin maka $1 - P_i$ merupakan notasi rumah tangga yang tidak miskin. Peluang bagi suatu rumah tangga miskin adalah :

$$1-P_i = \frac{1}{1+e^{Z_i}}$$

Dengan model statistik *Odds Ratio* dengan menggabungkan persamaan (5) dengan persamaan (6) diperoleh persamaan baru sehingga persamaan baru dapat ditulis menjadi :

$$\frac{P_i}{1 - P_i} = \frac{1+e^{Z_i}}{1+e^{Z_i}} = e^{Z_i}$$

Persamaan (7) selanjutnya ditransformasikan menjadi model logaritma natural sehingga menghasilkan persamaan sebagai berikut :

$$L_i = \ln \left[\frac{P_i}{1 - P_i} \right] = Z_i$$

Berdasarkan persamaan diatas maka yang menjadi model spesifik dalam penelitian ini adalah :

$$L_i = \ln \left[\frac{P_i}{1 - P_i} \right] = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

dimana,

$$\left[\frac{P_i}{1 - P_i} \right] = \text{Kemungkinan rumah tangga dalam kondisi tertentu}$$

β_0 = Konstanta

X_1 = Pendidikan yang diukur dengan tingkat pendidikan kepala keluarga

0 = Pendidikan SLTP ke bawah

1 = Pendidikan SLTA ke atas

X_2 = Status pekerjaan kepala rumah tangga

0 = Status pekerjaan informal

1 = Status pekerjaan formal

X_3 = Ukuran rumah tangga

0 = jika jumlah anggota rumah tangga >= 4

1 = jika jumlah anggota rumah tangga 1-3

ε_i = Kesalahan pengganggu

Untuk lebih meyakinkan hasil penghitungan regresi di atas selanjutnya dilakukan uji statistik. Model di atas akan diestimasi dengan pendekatan maximum *likelihood* menggunakan program SPSS versi 11.5 untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka dilakukan uji sebagai berikut

Uji Wald Test

Digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individu (parsial) terhadap variabel terikat. Wald Test ini dilakukan dengan membandingkan nilai Wald Test dengan nilai t tabel. Nilai t tabel didapat dengan cara $N - df$ dengan tingkat kepercayaan (α) 0,05 dan untuk menghitung t-test diperoleh dengan rumus :

$$\text{Wald Test} = \left[\frac{\beta_i^2}{\text{Se}\beta_i} \right]$$

Dimana,

β_i = Koefisien Regresi

$\text{Se}\beta_i$ = Standar Error β_i

Uji χ^2 (Chi Square test) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Uji χ^2 dilakukan dengan membandingkan nilai χ^2 hitung dengan χ^2 tabel. Dengan derajat kebebasan

sebanyak variabel bebas dan tingkat kepercayaan (α) 0,05. Jika nilai χ^2 hitung lebih besar dari nilai χ^2 tabel maka secara bersama-sama variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya bila nilai χ^2 hitung lebih kecil dari nilai χ^2 tabel maka secara bersama-sama variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel bebas. Adapun untuk mendapatkan nilai χ^2 hitung digunakan rumus sebagai berikut :

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^G \frac{N_i (P_i - P_n)^2}{P_n(1 - P_n)}$$

Dimana,

χ^2 = Chi Square

N_i = Frekuensi pada masing-masing

variabel

P_i = Probabilitas yang aktual/diteliti

P_n = Probabilitas yang diharapkan

G = Jumlah variabel

Uji Odds Ratio :

Uji *odds ratio* digunakan untuk mengetahui sebuah rumah tangga berstatus miskin atau tidak miskin dengan menggunakan persamaan :

$$OR = e^{bi}$$

Dimana,

OR = Odd Ratio

e = Log Natural yang bernilai 2,71828

bi = Koefisien Logistik variabel ke- i

Definisi Operasional Variabel

Rumah Tangga Miskin

Yaitu rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (kebutuhan minimum) sehari-hari. Atau rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan. Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumah tangga. Dalam hal ini pengukuran kemiskinan mengacu pada pendekatan rata-rata pengeluaran rumah tangga perbulan. Selanjutnya, dari rata-rata pengeluaran per bulan tersebut dibandingkan dengan garis kemiskinan sehingga akan diperoleh data rumah

tangga yang miskin dan yang tidak miskin di Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam rangka menentukan rumah tangga miskin, ditentukan berdasarkan batas kecukupan/garis kemiskinan perkapita perbulan. Untuk Kabupaten Padang Pariaman garis kemiskinan ditentukan sebesar Rp.222.744,- perkapita/bulan (Data BPS). Dengan demikian bagi rumah tangga hasil Susenas yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan kurang dari Rp.222.744,- perbulan maka rumah tangga tersebut dikategorikan miskin, sedangkan yang pengeluarannya lebih dari Rp.222.744,- maka rumah tangga tersebut tidak miskin. Selanjutnya dengan menggunakan *dummy variable* untuk rumah tangga miskin diberi skor 0 (nol) dan rumah tangga yang tidak miskin diberi skor 1 (satu).

Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga (X_1)

Yaitu tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh kepala rumah tangga. Dalam penelitian ini pendidikan kepala rumah tangga akan difokuskan pada :

- Kepala Rumah tangga dengan tingkat pendidikan SLTP ke bawah yang dikategorikan pendidikan rendah;
- Kepala Keluarga dengan pendidikan SLTA ke atas yang dikategorikan sebagai pendidikan tinggi.

Selanjutnya untuk keperluan penghitungan regresi logistik tingkat pendidikan kepala rumah tangga SLTA ke atas diberi kode 1 dan untuk pendidikan kepala rumah tangga SLTP ke bawah diberi kode 0.

Status Pekerjaan (X_2)

Yaitu status kedudukan kepala rumah tangga dalam pekerjaannya sehari-hari. Sektor pekerjaan formal terdiri atas buruh tetap / karyawan dan berusaha dibantu buruh tetap, sedangkan sektor pekerjaan informal terdiri atas berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain, berusaha dibantu anggota rumah tangga, pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar, dan pekerja bebas.

Dengan menggunakan *dummy variable*, maka untuk rumah tangga yang status pekerjaan kepala rumah tangganya di sektor formal diberi skor 1 (satu), sedangkan kepala rumah tangga yang

status pekerjaannya di sektor informal diberi skor 0 (nol).

Ukuran Rumah Tangga (X_3)

Ukuran rumah tangga dalam hal ini diartikan sebagai jumlah anggota rumahtangga yang setiap kebutuhan hidupnya menjadi tanggungan rumah tangga. Dengan menggunakan *dummy variable*, maka untuk rumah tangga yang memiliki jumlah anggota rumah tangga 1 hingga 3 orang selanjutnya diberi skor 1 (satu), sedangkan untuk rumah tangga yang memiliki jumlah anggota rumah tangga 4 orang atau lebih selanjutnya diberi skor 0 (nol).

PEMBAHASAN

Hasil Estimasi

Guna memperoleh hasil hipotesis dalam penelitian ini selanjutnya dilakukan perhitungan dengan menggunakan formula Regresi Logistik yang diolah dengan menggunakan pengolahan komputer melalui paket program *SPSS 11.5 for windows*.

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa penelitian ini akan dianalisis pengaruh karakteristik kepala rumah tangga berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, status pekerjaan, dan ukuran keluarga. Adapun hasil regresi logistik adalah seperti pada tabel 4. di bawah ini.

Tabel 4.8
Hasil Penghitungan Regresi Logistik

Variabel	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Pendidikan KRT (X_1)	0,17	0,02	73,737	1	0,00	1,194
Status Pekerjaan (X_2)	0,86	0,02	1329,89	1	0,00	2,384
Ukuran Rumahtangga (X_3)	1,65	0,02	4259,40	1	0,00	5,212
Constant	0,68	0,01	4142,32	1	0,00	1,982

χ^2 dengan df = 3 sebesar 6929,058

χ^2 -tabel dengan df = 3 dan nilai $\alpha = 5\%$ sebesar 7,815

Catatan: *) = Signifikan pada tingkat kesalahan (α) sebesar 0,05

Dari tabel 4.8 dapat dilihat bahwa dari 3 variabel bebas yang diteliti ternyata masing-masing variabel memberikan pengaruh yang beragam, dan seluruhnya menunjukkan pengaruh yang positif serta signifikan.

Selanjutnya, dari hasil regresi diperoleh nilai χ^2 -hitung sebesar 6929,058. Sedangkan nilai χ^2 -tabel dengan df=3 dan nilai $\alpha = 5$ persen sebesar 7,815 sehingga nilai χ^2 -hitung $>$ χ^2 -tabel. Dengan demikian seluruh variabel yakni pendidikan kepala rumah tangga, status pekerjaan, dan ukuran keluarga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Pariaman.

Bentuk pengaruh antara pendidikan kepala rumah tangga (X_1) terhadap rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Pariaman (Y) adalah **positif**. Maksudnya, kepala rumah tangga yang berpendidikan SLTA keatas peluangnya lebih rendah untuk masuk ke dalam kategori rumah tangga miskin dibandingkan dengan rumah tangga yang kepala rumah tangganya berpendidikan SLTP kebawah. Dari tabel 4.8 terlihat bahwa koefisien regresi variabel pendidikan kepala rumah tangga sebesar 0,177 dan *probability significancy* sebesar 0,000. Dengan demikian maka H_0 : **ditolak** dan hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini H_a : **diterima**, yang berarti bahwa pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Padang Pariaman adalah **signifikan**.

Bentuk pengaruh antara status pekerjaan (formal dan informal) yang dinotasikan dengan X_2 terhadap jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Pariaman adalah **positif**. Maksudnya kepala rumah tangga yang bekerja **formal** peluangnya lebih rendah untuk masuk ke dalam kategori rumah tangga miskin dibandingkan dengan rumah tangga yang kepala rumah tangganya bekerja **informal**. Dari tabel 4.8 terlihat bahwa koefisien regresi variabel status pekerjaan sebesar 0,869 dan *probability significancy* sebesar 0,0000 dengan demikian H_0 : **ditolak** dan hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini H_a : **diterima**, yang berarti bahwa pengaruh status pekerjaan terhadap rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Pariaman adalah **signifikan**.

Demikian juga halnya dengan variabel ukuran rumah tangga, bentuk pengaruh antara ukuran rumah tangga (X_3) terhadap rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Pariaman menghasilkan

koefisien regresi yang **positif**. Artinya, probabilitas rumah tangga yang memiliki ukuran rumah tangga 1 – 3 orang untuk masuk ke dalam kategori rumah tangga miskin lebih rendah dari rumah tangga yang memiliki ukuran rumah tangga 4 orang atau lebih.

Hasil estimasi persamaan model logistik pada rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Pariaman diperoleh model regresi logistik sebagai berikut :

$$Y = \ln \{p/1-p\} = 0,684 + 0,177 X_1 + 0,869 X_2 + 1,651 X_3$$

Dari model logistik di atas diperoleh estimator $\beta_0 = 0,684$; pendidikan kepala rumah tangga (β_1) = 0,177; variabel status pekerjaan (β_2) = 0,869 ; dan ukuran rumah tangga (β_3) = 1,651 yang ditentukan dengan memakai metode estimasi kecenderungan maksimal, dengan pengertian hasil atau nilai yang diobservasi mempunyai kecenderungan maksimal.

Jika variabel pendidikan kepala rumah tangga yang mempunyai koefisien regresi sebesar 0,177 meningkat satu unit sementara variabel bebas lainnya tidak berubah, maka proporsi kepala rumah tangga berpendidikan SLTP kebawah di Kabupaten Padang Pariaman yang rumah tangganya cenderung miskin sebesar 70,29 persen (lihat lampiran).

Sementara itu, nilai *Odds Ratio* (OR) variabel pendidikan kepala rumah tangga dari hasil perhitungan regresi logistik sebesar 1,194. Artinya, kemungkinan kepala rumah tangga yang berpendidikan SLTP kebawah di Kabupaten Padang Pariaman yang rumah tangganya miskin adalah sebesar 1,194 kali dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang berpendidikan SLTA keatas.

Selanjutnya, jika variabel status pekerjaan kepala rumah tangga yang mempunyai koefisien regresi sebesar 0,869 meningkat satu unit sementara variabel lainnya tidak berubah, maka proporsi kepala rumah tangga di Kabupaten Padang Pariaman dengan status pekerjaan informal yang rumah tangganya cenderung miskin sebesar 82,53 persen (lihat lampiran).

Sementara itu, nilai *Odds Ratio* (OR) variabel status pekerjaan kepala rumah tangga dari hasil penghitungan regresi logistik sebesar 2,384. Artinya, kemungkinan kepala rumah tangga yang status pekerjaannya informal yang rumah tangga-

nya miskin adalah sebesar 2,384 kali dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang status pekerjaannya formal.

Variabel ukuran rumah tangga mempunyai koefisien regresi sebesar 1,651. Jika variabel ukuran rumah tangga bertambah 1 orang sementara variabel bebas lainnya tidak berubah, maka proporsi kepala rumah tangga dengan ukuran rumah tangganya 4 orang atau lebih yang rumah tangganya cenderung miskin adalah sebesar 91,17 persen (lihat lampiran).

Selanjutnya, nilai *Odds Ratio* (OR) variabel ukuran rumah tangga dari hasil penghitungan regresi logistik sebesar 5,212. Nilai tersebut selanjutnya dapat diartikan kemungkinan/peluang kepala rumah tangga dengan ukuran rumah tangga yang lebih banyak (4 orang keatas) yang rumah tangganya miskin adalah sebesar 5,212 kali dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang ukuran rumah tangganya 1 – 3 orang.

Implikasi Kebijakan

Dengan terbuktinya variabel pendidikan yang signifikan terhadap terbentuknya rumah tangga miskin hal ini hendaknya menjadi perhatian yang lebih serius bagi pemerintah terutama dalam meningkatkan pendidikan masyarakat khususnya di Kabupaten Padang Pariaman. Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman hendaknya dapat dimulai dengan adanya perbaikan tingkat pendidikan masyarakat terutama difokus kepada generasi berikutnya.

Hanya dengan kebijakan pemerintah yang sungguh-sungguh dalam meningkatkan anggaran pembangunan pada sektor pendidikan diharapkan akan dapat meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat pada masa yang akan datang, serta masih perlu adanya pengawasan dan pembentukan sistem pendidikan yang aktif dan efektif.

Berkaitan dengan masalah status pekerjaan, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Padang Pariaman masih banyak yang melakukan pekerjaan pada jalur informal. Selain itu, masih banyak juga penduduk yang bekerja dengan rata-rata jumlah jam kerja perminggu dibawah jam kerja normal yakni dibawah 35 jam perminggu. Kondisi tersebut hendaknya dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah terutama dalam melakukan himbauan kepada masyarakat untuk lebih me-

manfaatkan waktu bekerja seoptimal mungkin agar produktivitas yang dihasilkan dapat lebih meningkatkan lagi.

Dengan meningkatnya produktivitas diharapkan pendapatan rumah tangga juga akan mengalami peningkatan dan pada akhirnya kebutuhan rumah tangga yang paling mendasar akan dapat dipenuhi sehingga mereka dapat hidup di atas garis kemiskinan. Pembukaan lapangan pekerjaan formal juga hendaknya menjadi bahan pemikiran pada masa yang akan datang.

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu program yang masih dijalankan oleh pemerintah adalah Keluarga Berencana (KB) dengan motto “dua anak lebih baik”. Penekanan terhadap jumlah anggota rumah tangga juga membawa dampak terhadap penekanan anggaran pengeluaran rumah tangga. Pameo lama yang menyatakan “banyak anak banyak rezeki” sudah tidak bisa dipakai lagi. Kenyataannya, semakin banyak anak yang menjadi tanggungan keluarga maka akan semakin banyak pula biaya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.

Terbentuknya rumah tangga/keluarga miskin hasil penelitian ini salah satunya disebabkan jumlah anggota rumah tangga yang cukup banyak, sehingga sosialisasi untuk menekan jumlah anak pada setiap keluarga di Kabupaten Padang Pariaman menjadi hal yang paling cocok guna membentuk keluarga kecil yang sejahtera pada masa yang akan datang. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan dan pengefektifan program Keluarga Berencana (KB).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan di atas, selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut ; (1). Pendidikan kepala rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap terbentuknya rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Pariaman. Dengan pendidikan kepala rumah tangga yang **rendah** kecenderungan rumah tangganya miskin sebesar 1,194 kali dibandingkan kepala rumah tangga yang berpendidikan **tinggi**; (2). Status pekerjaan kepala rumah tangga juga signifikan terhadap pembentukan rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini ditandai dengan koefisien regresi variabel status pekerjaan sebesar 0,869 serta nilai *Odds Ratio*

2,384. Kepala rumah tangga yang bekerja **informal** cenderung menjadi miskin 2,384 kali dibanding kepala rumah tangga yang bekerja **formal**.; (3). Sementara itu, ukuran rumah tangga dari hasil penelitian juga berpengaruh terhadap kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi yang positif serta nilai *Odds Ratio* sebesar 5,212. Artinya, jumlah anggota rumah tangga menjadi variabel utama yang menunjang rumah tangga menjadi miskin; (4). Secara bersama-sama tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan jumlah anggota rumah tangga berpengaruh secara signifikan dalam pembentukan rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Pariaman.

Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut ; (1). Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman hendaknya dapat dimulai dengan adanya perbaikan tingkat pendidikan masyarakat terutama difokuskan kepada generasi muda. Upaya yang dapat dilakukan yakni dengan kebijakan pemerintah yang sungguh-sungguh dalam meningkatkan anggaran pembangunan sektor pendidikan dan diharapkan akan dapat meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat pada masa yang akan datang ; (2). Berkaitan dengan masalah status pekerjaan, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Padang Pariaman masih banyak melakukan pekerjaan pada jalur informal. Kondisi tersebut hendaknya dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah terutama dalam melakukan himbuan kepada masyarakat untuk lebih memanfaatkan waktu bekerja seoptimal mungkin agar produktivitas yang dihasilkan dapat meningkat lebih baik. Disarankan juga agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendorong pihak swasta untuk dapat membuka lapangan pekerjaan formal baru. Selain itu pengadaan pelatihan-pelatihan keterampilan yang ditambah dengan suatu bentuk acara motivasi dalam bekerja sekiranya dapat juga mengoptimalkan produktivitas masyarakat ; (3). Terbentuknya keluarga/rumah tangga miskin hasil penelitian ini salah satunya disebabkan jumlah anggota rumah tangga yang cukup banyak.

Disarankan agar sosialisasi untuk menekan jumlah anak pada setiap keluarga di Kabupa-

ten Padang Pariaman menjadi pekerjaan prioritas guna membentuk keluarga kecil yang sejahtera pada masa yang akan datang.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik. 1999. *Beberapa Dimensi Sosial Ekonomi Penduduk Miskin*. Jakarta: BPS.
- _____. 2005. *Pelaksanaan Pendataan Rumah Tangga Miskin 2005*. Jakarta: BPS.
- _____. 2009. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2008*. Jakarta: BPS
- _____. 2008. *Survei Angkatan Kerja Nasional 2008: Pedoman Pencacah*. Jakarta: BPS.
- _____. 2008. *Survei Sosial Ekonomi Nasional 2008: Pedoman Pencacah*. Jakarta: BPS.
- _____. 2009. *Padang Pariaman Dalam Angka 2009*. Pariaman: BPS Kabupaten Padang Pariaman.
- Bellante and Jackson. 1990. *Human Resource Management (7th Edition)*. New Jersey: Prentice Hall.
- Biro Pusat Statistik. 1992. *Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia 1976-1990*. Jakarta: BPS.
- Combs, Philip H. dan Mamzoor Ahmed. 1985. *Memerangi Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafindo.
- Elfindri. 2001. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Padang: Universitas Andalas.
- Esmara, Hendra. 1986. *Distribusi Pendapatan Penduduk Indonesia*. Padang: Lembaga penelitian Ekonomi Regional Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Galbraith, John Kenneith. 1992. *Hakikat Kemiskinan Massa (terjemahan)*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Gilbert, Alan dan Josef Gugler. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan Di Dunia Ketiga (terjemahan)*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Gujarati, Damodar. 2000. *Ekonometrika Dasar (terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.
- Hagul, Peter. 1992. *Pembangunan Desa dan LSM*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hasbullah. 2003. *Edisi I Resume Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Cetakan Ke-3*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Hasibuan, Malayu SP. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dasar dan Kunci Keberhasilan, Edisi Revisi Cetakan Ke-1*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hersey, Paul and Kenneth H. Blanchard. 1996. *Organizational Behavior: Utilizing Human Resources (7th Edition)*. New Jersey: Prentice Hall .
- Hidayat. 1978. *Peranan Sektor Informal dalam Perekonomian Indonesia: Ekonomi Keuangan Indonesia, Vol. XXVI, No.4, Desember 1978*.
- Idris, Zahara. 1992. *Pengantar Pendidikan I*. Jakarta: Gramedia.
- Idris, Zahara dan Lisda Jamal. 1992. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Gramedia.
- Mantra, Ida Bagoes. 2000. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyadi, S. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prayitno. 2000. *Psikologi Pendidikan*. Padang: FIP.
- Sayogyo. 1996. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Sediaoetama, Ahmad Djaeni. 1989. *Ilmu Gizi: Untuk Mahasiswa dan Profesi di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Sjirat, Muchlis. 2007. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Konsumsi Rumah Tangga Miskin Perkotaan di Sumatera Barat: Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Andalas. Padang: Tidak Dipublikasikan.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Todaro, Michael. 1987. *Ilmu Ekonomi Bagi Negara Sedang Berkembang Buku I*. Jakarta: Akademika Pressindo.

14 *Jurnal Economac*, Volume 10, Nomor 2, Oktober 2010, hlm 1-7

Todaro, Michael. 2003. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga, Jilid 1 Edisi Ke-8*. Jakarta: Erlangga.

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.